

**ANALISIS PERAN SOSIALISASI KPU
PADA PEMILUKADA KABUPATEN SERANG TAHUN 2010
MENGHADAPI GOLONGAN PUTIH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Konsentrasi Ilmu Humas Program Studi Ilmu Komunikasi



Oleh:
Adhitya Angga P
NIM : 061589

**KONSENTRASI ILMU HUMAS
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG
2011**

Hidup Adalah Pilihan
(Angga)

Skripsi ini kupersembahkan untuk
Ibundaku tercinta, Keluarga dan
orang-orang yang kucintai

ABSTRAK

Adhitya Angga Pratama, NIM. 061589. Skripsi. Analisis Peran Sosialisasi KPU pada Pemilu Kabupaten Serang tahun 2010

Peran dan fungsi sosialisasi pada Pemilu Kabupaten Serang terasa sangat penting. Karena sosialisasi merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan KPU dalam menyebarkan informasi secara massal mengenai Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi teknik, jadi peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahap *fact finding*, *planning and programming*, *communicating* dan *evaluating* pada sosialisasi Pemilu Kabupaten Serang tahun 2010 menghadapi golput. Dan juga untuk mengetahui apakah sosialisasi memberikan kontribusi pada sikap golput masyarakat. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kajian ilmu komunikasi, sosial dan politik serta dapat dijadikan masukan bagi KPU pada pelaksanaan sosialisasi selanjutnya. Proses penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang yaitu anggota KPU dan Hupmas (Hubungan partisipasi masyarakat) keduanya adalah pokja sosialisasi pada Pemilu Kabupaten Serang tahun 2010. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pengamat politik dan perwakilan dari masyarakat, agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal. Sosialisasi KPU hanya menjalankan amanat aturan yang ada, seperti Undang-Undang, Peraturan KPU dan SK KPU Kabupaten Serang. Padahal jika KPU mengetahui betul apa yang diinginkan masyarakat dalam Pemilu, tingginya angka golput bisa diminimalisir.

ABSTRACT

Adhitya Angga Pratama. NIM. 061589. Research. The Analysis of KPU Socialization Role in *Pemilukada* Serang District in the Year of 2010 to Deal with *White Group*.

The role and function of socialization in *Pemilukada* Serang district is very important. Because of Socialization is one way that done by KPU in distributing information massively about *Pemilukada*. This research is using *Triangulasi* method technique. So, in this research are doing interview, observation, and field documentation to get the data based on the purpose of the research. The purpose of this research to know the step of *fact finding*, planning and programming, communicating and evaluating in socialization of *pemilukada* Serang District in the year of 2010 to deal with *white group*. And to know whether the socialization giving contribution to the *white group* attitude in society. The utilization of this research is expected can give the contribution and benefit to the communication science study, social and politic that can be an input to KPU in next step of socialization of execution. The sample determination process in this research is done by *purposively* and *snowball sampling*. *Purposive sampling* is chosen with the consideration and certain purpose. The informan in this research consist of 2 person they are KPU member and *Hupmas* (Public Participation Relation) both of it are *pokja* socialization in *Pemilukada* Serang District in the year of 2010. Beside that this research also using interview with political observer and representative from society, to get the maximum result research. The KPU socialization only implement the mandate of the rule that already exist, like in regulation, KPU regulation and SK KPU in Serang district. Other ways if KPU really know what the society want in *pemilukada*, the high amount of white group can be minimized.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas ridhahnya Nyalah Skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri tauladan bagi kita umat Islam.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Konsentrasi Ilmu Humas Program Studi Ilmu Komunikasi. Skripsi ini berjudul "Analisis Peran Sosialisasi KPU pada Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010 Menghadapi Golongan Putih".

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak H. DR. Ahmad Sihabudin, M.Si.
3. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Ibu Deviani Setyorini, S.Sos., MCMS.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi, Bapak Yeary Panji, S.Sos., M.Si.
5. Dosen Pembimbing skripsi Bapak Iksan Ahmad S.Ip, terimakasih atas semua yang telah diberikan, terutama dukungan dan bimbingannya.
6. Teguh Iman P. selaku dosen pembimbing skripsi II, terimakasih atas bimbingannya.

7. Ibunda Dra. Enan Nadia, terimakasih tak terhingga dari dulu, kini dan selamanya.
8. Mamah N'dut, Adikku Aviati, Kakakku Iis Faoziah, Affandi Prama, Ridwan, Ayat, Anis, Anton, Agus, Adi.S, Dd, dan seluruh Keluarga besar H. Djasura yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih untuk segalanya.
9. Aпти Nurmayati, terimakasih untuk segalanya.
10. Bapak Oman D. Saputra dan Ibu Yayat Hayati.
11. Keluarga Besar Activa dan Actifriend.
12. Gilang, Diska, Ferry, Dimas, Mamah, Papah, Dadan, Aji, A Arif, Sarti, cuby, dan seluruh Keluarga Besar De'Fortuna dan Fortuner terimakasih banyak untuk semuanya.
13. 41 Production, ceper, jendol, kiwong.
14. Klasik Untirta.
15. Keluarga besar Bar3t, terutama A Marli Subhiyat, A Oka dan A Ari.
16. Bapak Ari Pandu Witantra, S. Sos selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
17. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
18. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maupun Pusat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
19. Teman-teman KKM kelompok 66.

20. Teman-teman angkatan 2006 komunikasi, reguler maupun non reguler.

21. Teman-teman 1 bimbingan Dadan, Dd, Dina, Ega, Ales, Anto, Rai.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian pengantar yang dapat peneliti tuliskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam proposal ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 11 Januari 2011

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Perumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	13
1.5. Kegunaan Penelitian	14
1.5.1 Aspek Teoritis	14
1.5.2 Aspek Praktis	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kajian Pustaka	15
2.1.1 Ilmu Komunikasi	15
2.1.2 Hubungan Masyarakat (Humas)	16
2.1.2.1 Fungsi dan Tujuan Humas	17
2.1.2.2 Ruang Lingkup Humas	20
2.1.3 Sosialisasi	21
2.1.3.1 Sosialisasi Pemilukada	23
2.1.4 . Golput (Golongan Putih)	26
2.1.4.1 Golput Sebagai Gerakan Moral	26
2.1.4.2 Golput Sebagai Kalkulasi Suara yang Tidak Memilih karena Persoalan Teknis	28
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	30
2.3 Kerangka Konseptual	37
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 39
3.1 Metode Penelitian	39
3.2 Informan atau Informan Kunci	40
3.3 Instrumen Penelitian	43
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data	43
3.4 Analisis Data	45
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian	51

BAB IV HASIL PENELITIAN	52
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	52
4.2 Deskripsi Data	54
4.3 Hasil Penelitian	56
4.3.1 Landasan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010	56
4.3.2 Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 ...	58
4.3.3.1 Tahap Pembuatan rencana dan Program Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010.....	58
4.3.3.2 Tahap Pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010.....	60
4.3.3.3 Tahap Evaluasi Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010	62
4.3.4 Pemutakhiran Data Pemilih	66
4.4 Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Bentuk dan Derajat Partisipasi Politik Almond	35
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Ilustrasi 1: Partisipasi Politik Almond.....	31
Gambar 2.2 Ilustrasi 2: Piramida Partisipasi Politik Roth dan Wilson..	36
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Serang
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Hasil Wawancara
Lampiran 6	Surat keputusan KPU Nomor : 131/22 Kep.KPU.Srg 2010
Lampiran 7	Contoh alat peraga sosialisasi
Lampiran 8	Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010
Lampiran 9	Peraturan KPU No. 65 Tahun 2009
Lampiran 10	Bukti Bimbingan Skripsi
Lampiran 11	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Amanat konstitusi tersebut guna memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang memiliki makna penting di Negara Indonesia, menjadi landasan dan tujuan yang harus dicapai sebagai cermin keberhasilan pemilihan umum yang memberikan hak seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan umum.

Pemilihan umum yang merupakan simbol kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 23 tahun 2003 sesuai pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Hal ini merupakan perwujudan demokrasi yang menjadi landasan Negara Indonesia.

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia.

Menjaga proses demokrasi adalah memahami secara benar hak-hak yang dimiliki warga negara, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, memberikan aksi perlawanan terhadap siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan yang dibuat dan untuk dilaksanakan oleh manusia itu sendiri, yang kemudian berkembang dan bertujuan untuk membuat suatu system sebagai landasan Negara yang harus dijalankan oleh warga Negara. Di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik.

Pemilu sebagai sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara. Setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting; *pertama* legitimasi politik, *kedua* terciptanya perwakilan politik, *ketiga* sirkulasi elit politik dan *keempat* yaitu pendidikan politik. (Blakasuta, ed.18:2009).

Pertama Legitimasi politik dimaksud bahwa pemilihan umum memiliki wadah berupa aturan-aturan yang menjadikannya dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum. Kenyataan dilapangan adalah ketika anggota KPU kesulitan untuk mengambil keputusan, maka pertimbangan terbesarnya adalah dikembalikan terhadap Undang-undang pemilu ataupun peraturan pemilu.

Kedua adalah terciptanya perwakilan politik, pemilu berfungsi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Tidak mungkin apabila seluruh rakyat Indonesia memimpin Negara Indonesia secara bersama-sama, maka disinilah pentingnya pemilu untuk memilih wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali pemimpin yang dipilih oleh rakyat tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan nasib bangsa Indonesia.

Ketiga yaitu sirkulasi elit politik. Duduk di kursi kekuasaan terkadang membuat banyak orang terlena, bagaimana tidak, fasilitas terjamin, kesehatan diasuransikan, tunjangan besar dan masih banyak hal-hal indah yang ada dalam kursi kekuasaan, tapi salah-salah malah korupsi. Itu yang menyebabkan harus ada

sirkulasi elit agar tidak ada penguasa yang terus menerus berkuasa, sehingga menyebabkan penggunaan aset Negara untuk pribadi, keluarga dan golongan, atau dengan kata lain monopoli kekuasaan dalam waktu yang lama.

Yang terakhir atau *keempat* yaitu fungsi pemilu untuk memberikan pendidikan politik terhadap rakyat. Agar rakyat menjadi mengerti dan mampu memposisikan diri sebagai pemilik kedaulatan Negara. Dengan kata lain pemerintah adalah pesuruh atau pembantu rakyat. Tetapi anehnya di Negara ini rakyat yang ada di bawah kekuasaan pemerintah.

Ada tiga alasan utama mengapa masyarakat mau melibatkan diri dalam prosesi penyelenggaraan Pemilu; *Pertama*, masyarakat tertarik dengan agenda yang di usung oleh partai politik atau calegnya, karena menyentuh masalah utama yang dialami oleh masyarakat. *Kedua*, karena kampanye Pemilu hanya diselenggarakan hanya lima tahun sekali. *Ketiga*, kepentingan pragmatis, adanya pembagian sembako, alat olah raga, alat pertanian atau pun pemberian uang bagi masyarakat (Blakasuta, ed.18:2009).

Sudah semestinya fungsi pendidikan politik dimuat dalam materi kampanye. Kampanye merupakan sebuah tindakan politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Dalam sistim politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye *elektoral* pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat soal politik,

sehingga membuat masyarakat menjadi 'melek politik' atau memahami benar posisinya dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Membuat masyarakat menjadi "melek politik" bukan perkara mudah, partai politik harus menjalankan tugasnya memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Disamping itu KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga harus melakukan komunikasi politik dalam proses sosialisasi pada masyarakat dengan menggunakan pola komunikasi yang mampu dimengerti masyarakat dan KPU harus memahami benar apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Partisipasi politik dalam berdemokrasi tidak bisa dipaksakan, setiap individu memiliki hak sesuai hati nurani untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Tapi fenomena yang sedang marak belakangan ini di setiap Pemilu adalah individu yang tidak menggunakan hak pilihnya meningkat tajam. Pasti banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Dan fenomena ini juga terjadi pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.

Belum lama ini Kabupaten Serang telah selesai melaksanakan Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang. Pemilukada adalah wujud demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut secara garis besar menjelaskan tentang mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 merupakan rel yang menuntun kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum. Aturan lain yang juga harus diperhatikan adalah tentang sosialisasi pemilihan umum. Sosialisasi dikatakan penting karena didalamnya berisi penyebaran informasi dan petunjuk bagi seluruh masyarakat, yang kemudian hasilnya menjadi salah satu indikator keberhasilan pemilihan umum.

Sosialisasi pemilu pada Kabupaten Serang diatur dalam peraturan KPU nomor 65 tahun 2009, yang isinya menjelaskan pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam aturan tersebut diatur mengenai ketentuan umum pelaksanaan sosialisasi, asas pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi, tujuan dan target pencapaian dalam sosialisasi dan penyampaian informasi, tema dan materi sosialisasi dan penyampaian informasi, kelompok sasaran sosialisasi dan penyampaian informasi, metode media informasi sosialisasi dan penyampaian informasi, strategi tahapan dan penyampaian informasi, langkah kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi dan yang terakhir ketentuan lain serta penutup.

Sosialisasi Pemilu pada Kabupaten Serang dilaksanakan oleh pokja sosialisasi yang diwakili oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Serang dan Sekretariat KPU Kabupaten Serang subbagian Hupmas (hubungan partisipasi masyarakat).

Dalam Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010, sosialisasi adalah faktor utama dalam penyebaran informasi. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Kabupaten Serang menjadi tahu dan memahami apa itu Pemilukada dan apa pentingnya untuk mereka, bagaimana mekanisme pemungutan suara dalam Pemilukada, dimana mereka harus menggunakan hak pilihnya, kapan pelaksanaan Pemilukada tersebut, siapa saja yang mempunyai hak pilih dalam Pemilukada dan berapa budget yang dikeluarkan Pemerintah untuk Pemilukada Kabupaten Serang. Itu merupakan segelintir pertanyaan yang harus dijawab dan disebarluaskan secara merata demi suksesnya Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.

Sosialisasi memiliki definisi yaitu suatu proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu. (M. Sitorus, 61:2003).

Dalam konteks Pemilukada, sosialisasi memiliki andil besar dalam tercapainya partisipasi pemilih sesuai dengan target yang ingin diraih. Karena dalam sosialisasi hal-hal yang berkembang didalamnya adalah semata-mata menganut azas proses belajar. Jadi masyarakat yang diberikan materi sosialisasi diharapkan dapat menjadi pemilih yang bukan hanya sekedar tahu tetapi juga mengerti dan memahami segala aspek yang ada dalam sosialisasi tersebut.

Proses belajar yang merupakan definisi dari sosialisasi, dapat dimaknai sebagai proses manusia sebagai individu yang harus terus belajar agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, sosialisasi

adalah mutlak dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sekali lagi harus ada target yang pasti dalam pelaksanaannya. Yang harus di catat adalah jangan sesekali menganggap sosialisasi adalah suatu kegiatan formalitas, sosialisasi pemilu harus menjadi alat yang paling efektif dalam penyebarluasan pendidikan politik kepada calon pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Serang.

Sosialisasi yang gagal pada Pemilukada maka akan menyebabkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Karena sosialisasi adalah satu-satunya cara KPU dalam menyebarkan informasi massal terkait Pemilukada.

Seperti fenomena yang banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, dalam kegiatan Pemilu angka golput seringkali menjadi angka tertinggi melebihi pasangan calon yang memenangkan Pemilu. Bahkan ini juga terjadi di Pemilukada Kabupaten Serang. Apa yang menyebabkan ini terjadi, apakah ada hubungan antara fenomena ini dengan sosialisasi yang dilakukan KPU dan apakah KPU sudah memprediksi serta memberikan satu upaya yang dapat meminimalisir golput? Jangan sampai hal ini didiamkan dan berakibat buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sosialisasi merupakan hubungan yang erat kaitannya dengan ilmu kehumasan, karena didalamnya terkandung penyebaran informasi untuk dikonsumsi khalayak. Selain itu juga sosialisasi melewati beberapa tahapan agar yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya tahap pra sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan tersebut sesuai dengan operasional

humas, yaitu tahap fact finding atau pengumpulan fakta sebagai acuan pembuatan program, planning and programming atau perencanaan dan pembuatan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan fakta yang ditemukan, communicating atau pelaksanaan proses sosialisasi dan yang terakhir evaluating atau penilaian terhadap hasil untuk dijadikan koreksi sehingga dapat diperbaiki dalam program sosialisasi selanjutnya.

Terkait hal tersebut, pokja sosialisasi dan Hupmas dalam Sekretariat KPU berfungsi menyebarkan informasi tentang materi sosialisasi Pemilu pada Kabupaten Serang tahun 2010, sebagai amanat Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang "Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah".

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tahapan pengumpulan fakta dan data sosialisasi KPU Kabupaten pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010?
2. Bagaimana tahapan perencanaan sosialisasi KPU Kabupaten pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010?
3. Bagaimana tahapan pelaksanaan sosialisasi KPU Kabupaten pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010?
4. Bagaimana tahapan evaluasi sosialisasi KPU Kabupaten pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010?

1.3 Perumusan Masalah

Harus kita akui bersama bahwa tingkat komunikasi politik yang berjalan di Indonesia masih sarat akan kepentingan. Salah satu contoh, banyaknya kasus “money politic” yang terjadi dalam rangka pemenangan calon dalam pemilu. Padahal disini yang penting adalah pemberian pendidikan politik pada masyarakat, sehingga mampu memposisikan diri dalam kehidupan politik di Indonesia. Dengan lemahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, akan ada banyak hal yang mampu mendistorsi proses demokrasi di Indonesia. Ini yang kemudian menjadikan rakyat semakin apatis dengan pesta demokrasi yang sebenarnya menjadi hajat akbar rakyat Indonesia.

Gerakan tidak memilih atau golput bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi dimana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apa pun. Menurut kelompok ini, dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara ke depan adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). (Arief Budiman, eksponen golput, www.google.com).

Dilihat dari definisi di atas, maka bisa dikatakan golput sudah dicanangkan menjadi sebuah tradisi politik untuk mewarnai demokrasi, tapi yang dirasakan saat ini adalah ketika golput menjadi pemenang dalam pemilihan umum maka demokrasi terasa sudah tidak berarti lagi. Anggaran besar yang diserap untuk menyelenggarakan pemilihan umum dirasa sia-sia. Golput merupakan preseden buruk bagi kemajuan Bangsa. Bagaimana Bangsa Indonesia bisa maju kalau antara pemimpin dan rakyatnya sudah tidak ada lagi rasa saling percaya. Negara yang maju adalah Negara yang pemerintahannya sejalan dengan keinginan masyarakat melalui satu komando dari pemimpinnya. Dengan kata lain, antara pemimpin dan rakyat harus sinkron. Dalam hal ini pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat harus secara sungguh-sungguh mengabdikan pada rakyat, begitupun sebaliknya, rakyat mendukung sepenuhnya terhadap pemimpin, agar pemimpin dan rakyat bersinergi membangun Bangsa.

Sosialisasi sejalan dengan manusia yang merupakan makhluk sosial, yang selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sosialisasi berperan sangat luar biasa dalam penyebaran informasi. Tetapi syarat utama penyebaran informasi adalah pesan yang disampaikan komunikator dapat dimengerti dengan baik oleh komunikan, sehingga komunikasi dapat berlangsung

efektif dan efisien. Jangan sampai dana sosialisasi yang besar malah menghasilkan golput yang besar pula.

KPUD Kabupaten Serang dalam melaksanakan sosialisasi merujuk pada Peraturan KPU nomor 65 tahun 2009 tentang sosialisasi dan penampaian informasi. Pelaksanaan teknis sosialisasi dilapangan dikembalikan pada aturan tersebut. Permasalahannya terkadang fakta di lapangan menunjukkan masih kurang efektif dan efisiennya sosialisasi yang dilakukan KPUD, seperti contoh sosialisasi KPUD Kabupaten Serang tv lokal yang belum lama berdiri dan jangkauannya belum sampai daerah Kabupaten Serang secara menyeluruh, padahal alokasi anggarannya harusnya dapat digunakan untuk bentuk sosialisasi lain yang lebih bisa menjangkau wilayah Kabupaten Serang secara menyeluruh.

“Angka golput di pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Serang mencapai 40,79 persen,dari 982.391 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Sementara jumlah masyarakat yang berpartisipasi sebanyak 581.676,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Enan Nadia, saat membacakan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih di aula setda Pemkab Serang, Sabtu(15/5). Dari 581.676 suara tersebut,lanjut Enan, 552.911 adalah suara yang sah,sementara suara yang tidak sah sebanyak 28.765 suara. Pada kesempatan tersebut,pasangan Taufik Nuriman-Tatu Hasanah (TUNTAS) terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015,dengan perolehan suara sebanyak 304.629, atau 55,10 persen. Sementara peringkat kedua diduduki pasangan Andi Sujadi-Sukeni (ASSIK) denga perolehan suara sebanyak 177.817 suara,atau 32,16 persen.Sementara posisi terlahir adalah pasangan RA Syahbandar-Jahidi. S (Syajadah) dengan 70.465suara,atau 7,4 persen. Dalam rapat pleno yang dimulai sejak jam 08.00 WIB,dari tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati,hanya pasangan Taufik Nuriman yang hadir, sementara dua pasangan lainnya tidak nampak,hanya diwakili oleh tim suksesnya”. (sumber FBn, 15 Mei 2010).

Dari uraian di atas, rumusan masalahnya adalah "Bagaiman Peran Sosialisasi KPUD pada Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010 Menghadapi golput".

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tahapan pengumpulan fakta dan data sosialisasi KPU Kabupaten Serang pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.
2. Untuk mengetahui tahapan perencanaan sosialisasi KPU Kabupaten Serang pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.
3. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan sosialisasi KPU Kabupaten Serang pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.
4. Untuk mengetahui tahapan evaluasi sosialisasi KPU Kabupaten Serang pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kajian ilmu komunikasi, sosial dan politik.

1.5.1 Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPU Kabupaten Serang untuk lebih menyempurnakan dan mengevaluasi dalam kegiatan sosialisasi Pemilihan umum dan lebih spesifiknya agar angka golput dapat terus di tekan guna perwujudan demokrasi di Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang 1945.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ilmu komunikasi

Komunikasi secara sederhana merupakan proses penyampaian pesan secara dua arah timbal balik dari komunikator kepada komunikan melalui media sehingga menciptakan efek sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Sarah Trenholm dan Arthur Jensen (1996:4) komunikasi adalah "*A process by which a source transmits a message to a receiver through some channel.*" (Komunikasi adalah suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui saluran) (Sarah Trenholm dan Arthur Jensen, 1996:4).

Menurut Harold D. Lasswell sebagaimana dikutip Sandjaja (1999:7) cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: *Who says what In which Channel To Whom With What Effect?* (Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek bagaimana?) (Lasswell, 1999:7).

David K. Berlo pada tahun 1960 yang dikutip Deddy Mulyana (2002:150) mengemukakan model komunikasi SMCR, kepanjangan dari Source (sumber), Message (pesan), Chanel (media) dan Reseiver (penerima). Sebagaimana

dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan. Baik seseorang maupun kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan kedalam suatu kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. Saluran adalah medium yang membawa pesan dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. (Mulyana, 2002:150).

2.1.2 Hubungan Masyarakat (Humas)

Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan suatu bidang yang sangat diperlukan oleh setiap lembaga. Baik lembaga komersial maupun nonkomersial. Mulai dari perusahaan, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pemerintah membutuhkan peran humas.

Menurut W. Emerson Reck, definisi humas adalah :

“Public Relations is the continued proses of keying policies, services and actions to the best interest of those individual and groups whose confidence and goodwill an individual or institution covets, and secondly, it is the interpretation of these policies, services and actions to assure complete understanding and appreciation” (Humas adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayanan-pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan *goodwill* dari mereka. Kedua, pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan-penghargaan yang sebaik-baiknya). (Muslimin. 2004. *Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian*. Malang: UMM Press. Hal 2.)

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa humas merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi kelembagaan. Hal tersebut dikarenakan humas melakukan proses komunikasi dua

arah timbal balik antara lembaga dengan publiknya (internal dan eksternal) agar tercipta saling pengertian dan memperoleh kepercayaan dari publik.

Terdapat tiga fungsi humas menurut Edward L. Bernay yang dimuat dalam bukunya *Public Relation* (1952, University of Oklahoma Press), yaitu:

1. Memberikan peranan kepada masyarakat
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung
3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hubungan humas dan masyarakat harus bersinergi. Jadi proses yang berkesinambungan harus dilakukan humas dalam memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat.

2.1.2.1 Fungsi dan Tujuan Humas

Fungsi adalah harapan khalayak terhadap apa yang dilakukan humas sesuai dengan kedudukannya. Secara garis besar fungsi humas adalah:

1. Sebagai *communicator* atau penghubung antara lembaga yang diwakili dengan publiknya.
2. Membina hubungan, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.
3. Peranan *back up management*, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen lembaga.

4. Membentuk *corporate image*, artinya humas berupaya menciptakan citra bagi lembaganya. (Rosady Ruslan, 2008. *Kiat dan Strategi Kampanye Publik Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 9-10).

Sedangkan tujuan merupakan sesuatu yang mengarahkan kegiatan humas sehingga tidak salah sasaran. Tujuan humas menurut Rachmat Kriyantono antara lain menciptakan pemahaman publik, membangun citra korporat, membangun opini publik yang *favourable* serta membentuk *goodwill* dan kerjasama.

1. Menciptakan pemahaman (*mutual understanding*) antara lembaga dengan publiknya.

Tujuan kegiatan humas pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian antara lembaga dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi (*well-informed*) antara lembaga dan publiknya. Kecukupan informasi ini merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. Kesalahpahaman akibat salah persepsi atau kekurangan informasi merupakan kesalahan mendasar dalam kegiatan komunikasi (*primary-breakdown of communication*).

2. Membangun citra korporat (*corporate image*).

Citra perusahaan atau lembaga (*corporate image*) bukan hanya dilakukan seorang humas sendirian, tetapi perilaku seluruh unsur lembaga (karyawan dan manajer) ikut andil dalam pembentukan

citra ini, baik disadari atau tidak. Citra positif merupakan langkah penting menggapai reputasi lembaga di mata khalayak.

3. Membentuk opini publik yang *favourable*.

Sikap publik terhadap lembaga bila diekspresikan disebut opini publik. Humas dituntut memelihara komunikasi persuasif yang ditujukan untuk menjaga opini yang mendukung (*maintain favourable opinion*), menciptakan opini yang masih tersembunyi atau yang belum diekspresikan (*create opinion where none exist or where it is latent*), serta menetralkan opini yang negatif (*neutralize hostile opinion*).

4. Membentuk *goodwill* dan kerjasama.

Pada tahap ini, tujuan humas sudah pada tahap tindakan nyata. Artinya sudah tercipta jalinan kerjasama dalam bentuk perilaku tertentu yang mendukung keberhasilan lembaga. *Goodwill* dan kerjasama dapat terwujud karena ada inisiatif yang dilakukan berulang-ulang oleh humas untuk menanamkan saling pengertian dan kepercayaan kepada publik. Kemudian diikuti tindakan nyata perusahaan untuk komitmen mewujudkan kepentingan publik. (Rachmat Kriyantono. 2008. *Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 7-20).

2.1.2.2 Ruang Lingkup Humas

Ruang lingkup pekerjaan humas dalam sebuah lembaga secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. *Publication and Publicity*, yaitu mengenalkan lembaga kepada publik. Misalnya membuat tulisan yang disebarakan ke media, *news letter*, artikel, dan *press release*.
2. *Events*, mengorganisasi *event* atau kegiatan supaya membentuk citra.
3. *News*, pekerjaan seorang humas adalah menghasilkan produk-produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik, seperti *press release*, *news release*, dan berita.
4. *Community Involvement*, humas harus membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya.
5. *Identity-Media*, merupakan pekerjaan humas dalam membina hubungan dengan media (pers). Media adalah mitra kerja abadi humas. Media butuh humas sebagai sumber berita dan humas butuh media sebagai sarana penyebar informasi serta pembentuk opini publik.
6. *Lobbying*, keahlian dalam *lobbying* dan negosiasi dibutuhkan pada saat terjadi krisis manajemen untuk mencapai kata sepakat diantara pihak yang bertikai.

7. *Social Investment*, pekerjaan humas untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. (Rachmat Kriyantono. 2008. *Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 23-25).

2.1.3 Sosialisasi

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan aktifitas selalu membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa sendiri dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Untuk memenuhi hal tersebut manusia akan bersosialisasi dengan masyarakat dalam lingkungannya.

Sosialisasi yaitu suatu proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu. (M. Sitorus, 2003)

Sosialisasi juga akan menimbulkan kepribadian sesuai dengan nilai dan norma yang dianut. Misalnya dari warisan biologis, lingkungan alam, sosial, dan kelompok manusia.

1. Warisan biologis mempengaruhi kehidupan manusia dan setiap manusia mempunyai warisan biologi yang uunik, berbeda dengan orang lain.

2. Warisan lingkungan alam, perbedaan iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri dengan alam.
3. Warisan sosial, selain alam mempengaruhi kebudayaan, sebaiknya kebudayaan juga mempengaruhi alam.
4. Kelompok manusia, kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Setiap anggota kelompok memiliki peranan-peranan yang diwariskan kepada anggota kelompoknya (M. Sitorus, 2003:64-65).

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

2.1.3.1 Sosialisasi Pemilukada

Kegiatan sosialisasi pada pemilukada sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang sosialisasi harus dilaksanakan secara maksimal mulai dari pra, kegiatan dan paska, agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara baik oleh para pemilih, pasangan calon, partai politik dan seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan informasi mengenai pemilukada.

Sosialisasi Pemilukada merupakan satu-satunya cara yang dilakukan KPUD dalam menyebarkan informasi tentang Pemilukada secara masal kepada seluruh lapisan masyarakat, yang diharapkan berimbas pada naiknya angka partisipasi politik masyarakat. Ini yang kemudian menjadikan sosialisasi memiliki nilai yang sangat tinggi dalam konteks Pemilukada.

Menurut Gabriel Almond (1999), partisipasi politik diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang dictator militer. Peran mereka sebagai agregator politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya.

Salah satu faktor terciptanya partisipasi politik adalah proses sosialisasi, karena dalam sosialisasi masyarakat diberikan informasi mengenai pemilukada sehingga melahirkan partisipasi politik sesuai dengan yang diharapkan.

Kemampuan melakukan komunikasi politik mempengaruhi terciptanya partisipasi masyarakat. Komunikasi politik berupaya mewujudkan muatan atau tujuan politik individu, golongan atau partai.

Mochtar Pabotinggi (1993) dalam praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi:

1. Distorsi bahasa sebagai "topeng"; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson (1966), "bahasa topeng".
2. Distorsi bahasa sebagai "proyek lupa"; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang."
3. Distorsi bahasa sebagai "representasi"; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai "ideologi". Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.

Idealnya sosialisasi dalam pemilukada membutuhkan banyak aturan pendukung agar bisa berdiri kokoh sebagai sarana penting dalam penyebaran informasi terkait Pemilukada. Aturan pendukung tersebut misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Ketiga Undang-Undang tersebut memiliki ikatan yang sangat kuat dalam mewujudkan demokrasi yang konstruktif lewat proses sosialisasi Pemilukada. Karena bila kita kaji satu persatu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public bertujuan membuka akses lembaga atau badan public untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal ini konteks yang diangkat adalah penyebarluasan informasi tentang Pemilukada Kabupaten Serang oleh KPUD Kabupaten Serang secara jelas.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang saat ini menganut system otonomi daerah. Aturan mengenai Kepala daerah dari mulai pencalonan, pemilihan, pengangkatan sampai pemberhentian tercantum didalamnya.

Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang ini mengatur posisi partai politik di Negara Indonesia. Dikaitkan dengan Pemilukada, Undang-Undang partai politik dan Undang-Undang pemerintah daerah harusnya dapat mengatur setoran calon Kepala Daerah

kepada partai politik yang nominalnya sangat besar dan terkadang berlebihan. Yang di khawatirkan, ini menjadi asal muasal banyaknya Kepala Daerah yang terganjal kasus korupsi. Harusnya kedua undang-undang tersebut bisa membatasi nominal setoran, yang sewajarnya saja.

Proses dalam Penyelenggaraan Pemilu pada memerlukan koordinasi yang sinergis untuk menggabungkan satu aturan dengan aturan lainnya agar tidak tumpang tindih. Ini terkait pembenahan secara sistemik agar masyarakat tidak lagi apatis, pasif dan radikal dalam memandang dan melaksanakan perwujudan demokrasi di Indonesia.

2.1.4 Golput

2.1.4.1 Golput Sebagai Gerakan Moral

Menanti kepastian golput pada pemilu adalah hal yang menarik. Memang benar adanya, karena golput adalah "kambing hitam" yang dijadikan indikator sukses atau tidaknya pemilihan umum. Menengok sejarah, berbicara mengenai golput, kita harus tengok sejarahnya. Golongan putih (golput) pada dasarnya adalah sebuah "gerakan moral" yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pemungutan suara pada pemilu pertama di era Orde Baru dilaksanakan.

Pencetusan gerakan itu disambung dengan penempelan pamflet kampanye yang menyatakan tidak akan turut dalam pemilu, tanda gambarnya segi lima dengan dasar warna putih. Kampanye tersebut langsung mendapat respon dari

aparatus penguasa. Pangkoptibda Jakarta menyatakan "golput" sebagai organisasi terlarang dan pamflet tanda gambar golput mesti dibersihkan.

Sesuai dengan sejarahnya bahwa golput adalah sebuah gerakan moral sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa. Jadi golput tidak bisa lari dari paham sebuah "gerakan moral". Gerakan moral disini bisa karena alasan apatis terhadap penguasa, penyelenggara pemilu dan hal-hal yang lain yang erat kaitannya dengan hasil pemilu yang tidak mementingkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Banyak kalangan menyimpulkan, karena tingginya angka golput khususnya sejak pemilu 2004 maka pemenang pemilu sebenarnya adalah golput, bukan partai politik. Meskipun demikian, tujuan golput bukan untuk kemenangan politik. Golput hanya gerakan moral, sehingga sebesar apa pun tetap tidak bisa berkuasa, kecuali golput menjadi partai politik peserta pemilu.

Terus meningkatnya angka golput, memicu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pada golput. Fatwa tersebut diputuskan melalui forum Ijtima' Ulama di Padang Panjang, Sumatra Barat 24-26 Januari 2009. Menurut KH Ma'aruf Amin, Ketua MUI, fatwa ini dibuat agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang bisa memperjuangkan syariat. Bila pemimpinnya sudah syariat maka sistemnya dan orang-orangnya akan diubah menuju kebaikan dan perubahan. Keluarnya fatwa ini menimbulkan pro dan kontra karena golput disamakan dengan perbuatan melanggar perintah agama yang ganjarannya dosa.

Lantas bagaimana memahami golput? Golput adalah hak konstitusional, hak pilih untuk tidak memilih, yang dilindungi UUD 1945 Pasal 28E ayat (2): setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Rasa apatis rakyat terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan caleg adalah bentuk kekecewaan terhadap hasil pemilu yang tidak mampu berbuat banyak dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil."Perubahan gaya hidup memengaruhi perubahan dunia ini. Peningkatan kualitas kehidupan boleh kita harapkan pada individu-individu yang mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, bukan pada para caleg yang fotonya terpampang di poster-poster butut" (Kompas Minggu, 4/1/2009).

Pernyataan itu juga dapat diartikan sebagai sikap apatis atau tak adanya harapan pada para aktivis politik yang kini sedang berjuang di medan parlementarian entah mementingkan rakyat atau hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok. Yang jelas golput adalah sebuah gerakan moral sebagai bentuk perlawanan, kekecewaan dan tandingan pemegang kekuasaan Negara yaitu pemerintah.

2.1.4.2 Golput Sebagai Kalkulasi Suara yang Tidak Memilih karena Persoalan Teknis

Seiring berjalannya waktu terlebih pasca reformasi, banyak orang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu bukan hanya karena alasan gerakan moral menentang penguasa, tapi bisa juga karena alasan teknis mereka disebut golput.

Lantas apa sebenarnya pemahaman tentang golput yang kemudian dapat dijadikan sebuah dasar untuk memahami dan membedakan individu yang benar-

benar dikategorikan golput atau individu yang tidak bisa menyuarkan hak pilihnya karena alasan teknis.

Individu atau kelompok yang tidak menggunakan hak pilih dikarenakan persoalan teknis misalnya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) padahal seharusnya orang tersebut mempunyai hak pilih, atau dikarenakan pilihan politik individu sebagai wujud perlawanan bagi pemerintah dengan cara tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum, orang-orang dalam katagori tersebut setelah dikalkulasi akhirnya masuk kedalam suara golput. Hal ini terjadi karena suara keduanya sulit untuk diidentifikasi.

M. Ali Suro selaku pangamat politik Banten dan aktivis pergerakan mahasiswa menerangkan bahwa mengukur angka golput saat ini sangat sulit karena suaranya bercampur dengan orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau karena alasan teknis lainnya.

Padahal jika ditinjau dari latar belakang golput dan golput karena faktor teknis sangat berbeda. Golput yang sebenarnya adalah sebuah gerakan moral tanpa ada alasan lain yang menyertainya. Tapi golput karena faktor teknis adalah sebuah kesalahan sistemik yang kemudian berimbas kepada suara pemilih yang tidak bias ikut serta dalam Pemilihan Umum.

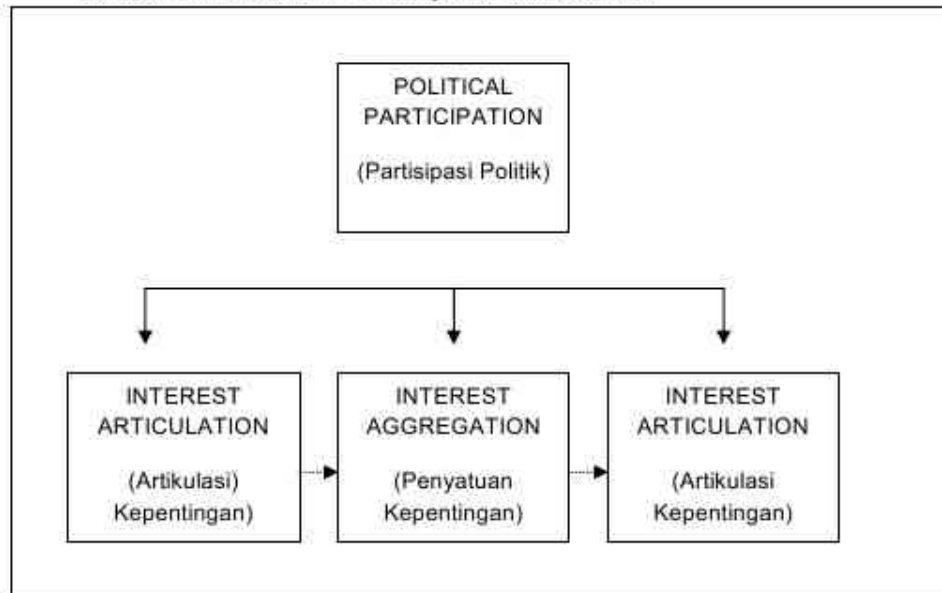
Penyebab golput karena faktor teknis pada umumnya karena hak pemilih tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu kurang memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai hal tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan operasional public relation. Operasional public relation menjelaskan bahwa ketika menjalankan kegiatan kehumasan, maka harus melewati tahapan-tahapan yang terstruktur. Ada empat tahapan dalam operasional public relation, yang pertama adalah Fact finding, kedua planning dan programming, ketiga communicating dan yang terakhir adalah evaluating. Bila dikombinasikan dalam bahasan politik atau lebih sempitnya pemilu, keempat tahapan tersebut harus menjadikan tingkat partisipasi pemilih menjadi tinggi.

Bangsa besar memiliki bangunan organisasi yang telah terspesialisasi dalam menyalurkan bentuk agregasi politik berikut kebijakan terkait menghasilkan partai politik. Oleh karena itu partisipasi politik menurut Gabriel Almond (1999) terbagi ke dalam 3 kategori seperti ilustrasi berikut ini:

Gambar 2.1. Ilustrasi 1: Partisipasi Politik Almond



(Sumber: Almond, 1999).

Almond seterusnya membagi partisipasi politik dalam kelompok-kelompok yaitu:

1. Kelompok kepentingan, mereka dapat duduk dalam badan pengawas pemerintahan (ombudsman), misalnya dalam masalah pelayanan publik,
2. Kelompok anomic, mereka adalah kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun ke jalan karena rasa ketidakadilan. Pada saat seperti ini sangat memungkinkan kekerasan akan terjadi "lead to violence" karena kelompok yang ada dan terorganisir semisal partai politik tidak mampu mewakili kepentingan mereka yang marah dalam sistem politik. Kekerasan dapat meledak pada saat tidak terduga dan tidak terkendali. Walaupun kelompok anomic ada pula yang secara sengaja diorganisir untuk kepentingan politik tertentu,

3. Kelompok non-asosiasional, sangat jarang sekali terorganisir, disebutkan aktivitas mereka yang sangat episodic pula. Perbedaan dari kelompok anomic adalah dasar mereka membentuk kelompok karena kesamaan kepentingan etnik, wilayah, agama, pekerjaan, dan juga tali kekeluargaan. Kelompok ini bisa berkelanjutan bila dibandingkan dengan kelompok anomic. Kelompok anomic terbagi 2 yaitu: 1) kelompok besar, terorganisir dan 2) sub-kelompok kecil pedesaan, mengenal satu sama lain sehingga lebih efektif,
4. Kelompok institutional, merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa partai politik, korporat bisnis, legislative, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, dimana mereka mendukung kelompok khusus dan memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok,
5. Kelompok asosiasional, merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha,
6. Kecenderungan sekarang ini timbul kelompok besar ke-6 yaitu Civil Society, dimana kelompok masyarakat terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan, atau kontrol dari pemerintah berupa aturan. Mereka merupakan asosiasi bersifat sukarela.

Apabila kita mengamati logika partisipasi politik yang dilakukan oleh kaum buruh, maka kegiatan mereka diawali dengan pembentukan:

1. Kelompok anomic secara spontan
2. Kelompok non-asosiasional, menggalang dukungan secara kolektif dari kelas pekerja, seperti demonstrasi ke jalanan pada saat 'May day' (hari buruh)
3. Kelompok institutional, melalui departemen tenaga kerja di pemerintahan melahirkan UU Perburuhan, diikuti dengan
4. Solidisasi Kelompok asosiasional, yaitu terbentuknya serikat pekerja.

Bila berbicara mengenai kelompok kepentingan, menurut Almond, terbagi menjadi 3 sistem:

1. Pluralis dengan ciri:
 - ∞ Tunggal
 - ∞ Keanggotaan wajib dan terbatas
 - ∞ Organisasi terdesentralisasi
 - ∞ Pemisahan tegas antara kelompok kepentingan dan pemerintah
2. Demokratis-Korporatis dengan ciri:
 - ∞ Asosiasi puncak mewakili tiap kepentingan

- ∞ Keanggotaan berada pada asosiasi puncak wajib dan hampir bersifat universal
 - ∞ Asosiasi puncak terorganisir dan mengatur aksi tiap anggota
 - ∞ Kelompok secara sistematis terlibat dalam pembuatan dan penerapan kebijakan
3. Terkontrol dengan ciri:
- ∞ Hanya satu kelompok tiap sektor sosial
 - ∞ Keanggotaan wajib
 - ∞ Setiap kelompok hirarkhis terorganisir
 - ∞ Setiap kelompok dikontrol oleh pemerintah atau agen untuk memobilisasi dukungan untuk mendukung kebijakan.

Bentuk umum dari partisipasi politik adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu). Bentuk partisipasi politik paling minim seperti ini dapat dijumpai pada sistem politik demokratik sampai paling otoritarian sekalipun. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada pada sistem politik terbagi menjadi level atau derajat pemberian partisipasi seperti tergambar pada tabel berikut:

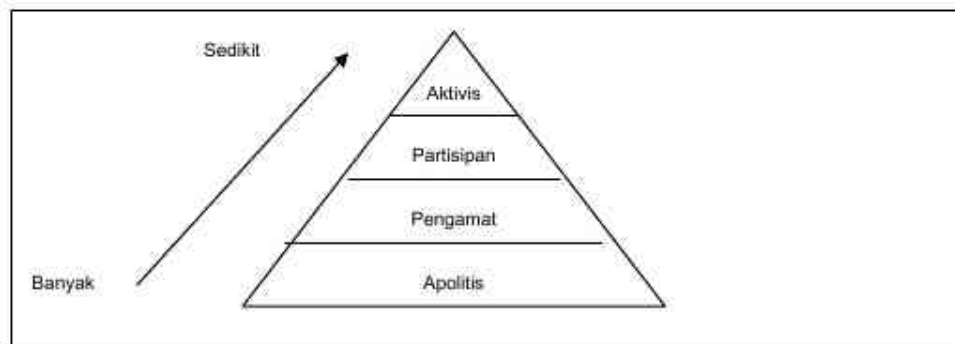
Tabel 2.1 Bentuk dan Derajat Partisipasi Politik Almond

BENTUK	RUANG LINGKUP	DERAJAT
Voting (pemberian suara)	Luas keputusan pemerintah	Sedang
Informal Group (kelompok informal) Social Movemen (pergerakan social)	Aktivitas kolektif, kebijakan umum	Tinggi
Direct Contact (kontak langsung)	Spesifik urusan personal/pribadi	Rendah
Protest Activity (aktivitas protes)	Ekspresif, urusan spesifik	Tinggi

Sumber: Almond (1999)

David F. Roth dan Frank L. Wilson (1980) menstrukturkan partisipasi politik ke dalam piramida partisipasi sebagaimana ilustrasi berikut:

Gambar 2.2 Ilustrasi 2: Piramida Partisipasi Politik Roth dan Wilson



Sumber: Budiardjo (1998)

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa “penggabungan kepentingan” (interest aggregation) dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo, 1998).

2.3 Kerangka Konseptual

Cutlip dan Center mengemukakan tentang tahap-tahap proses operasional PR. Menurut mereka proses operasional PR harus melewati 4 tahapan yaitu fact finding, planning and programming, communicating dan evaluating. Selanjutnya pada pelaksanaannya, untuk memperoleh efek yang maksimal, Cutlip dan Center menyatakan bahwa empat langkah tersebut harus dilaksanakan dengan konsep putaran.

1. Tahap Fact Finding

Yaitu mengumpulkan data sesuai kenyataan yang ada. Dalam hal ini data yang dicari adalah data yang benar-benar langsung dari sumbernya, tidak boleh data fiktif, karena akan berpengaruh bagi hasilnya.

2. Tahap Planning dan Programming

Yaitu merencanakan dan membuat program sesuai dengan apa yang telah diketahui dari proses fact finding.

3. Tahap Communicating

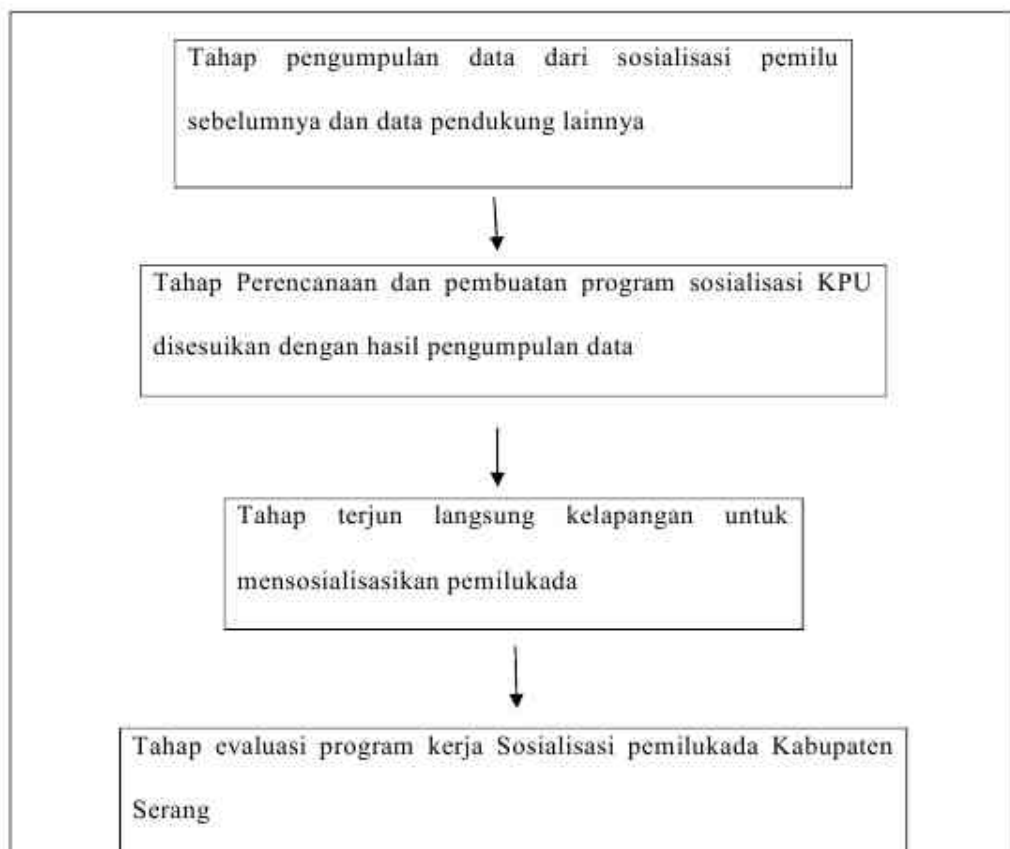
Yaitu tahap pelaksanaan komunikasi. Disini adalah proses dimana pelaksana terjun langsung ke lapangan untuk mengkomunikasikan program kepada khalayak.

4. Tahap Evaluating

Yaitu tahap melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan dari tahap pertama sampai dengan akhir, guna dijadikan suatu pembelajaran yang berharga untuk dijadikan pedoman program selanjutnya.

Dari pemaparan di atas peneliti mencoba mendeskripsikan kerangka penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian berbeda dengan teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data (Irawan, 2002:9). Metode penelitian berkaitan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan (Nazir, 2003:44).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah :

”Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. (Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal 9).

Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan data yang diperoleh dilapangan secara jelas mengenai peran sosialisasi KPU pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 menghadapi golput.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dipilih karena penjabaran akan sosialisasi dan golput dirasa sangat kompleks, sehingga membutuhkan kekuatan untuk memperjelas dan menghasilkan kesimpulan yang memuaskan semua pihak. Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan memperhatikan (observasi) kegiatan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Dan tentunya juga akan membuka dokumentasi dari catatan resmi lembaga KPU untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2 Informan atau Informan Kunci

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. (Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal 216).

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. (Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal 219).

Proses penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Caranya dengan memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. (Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, Hal 219).

Teknik *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar karena karena jumlah sumber data yang sedikit tersebut dirasa masih kurang sehingga mencari orang lain yang dapat dijadikan sumber. (Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, Hal 219).

Sanafiah Faisal (1990) menyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

(Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal 221) :

Informan atau informan kunci yang dipilih dan dijadikan data primer adalah Anggota KPU Kabupaten Serang pokja sosialisasi pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 dan Kasubbag hubungan teknis dan hubungan partisipasi masyarakat (Hupmas) sekretariat KPU Kabupaten Serang, karena dianggap merekalah pemegang kebijakan dan yang memiliki wewenang dalam menyusun dan melaksanakan sosialisasi pemilukada Kabupaten Serang. Oleh karena itu anggota KPU Kabupaten Serang Pokja Sosialisasi dan Kasubbag Hupmas sekretariat KPU Kabupaten Serang memenuhi kriteria sebagai sumber informan berdasarkan pernyataan Sanafah Faisal. Informan atau informan kunci ini akan berkembang selama penelitian ini berlangsung.

3.3 Instrumen Penelitian

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian adalah sebagai berikut :

A. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi atau pereakapan antara peneliti dengan informan. Rachmat Kriyantono mengungkapkan bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. (Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 98).

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. (Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 100).

Peneliti atau pewawancara dalam wawancara mendalam (*depth interview*) ini relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban. Karena itu peneliti mempunyai tugas berat agar informan bersedia memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu

tidak ada yang disembunyikan. Caranya dengan mengusahakan wawancara berlangsung informal seperti orang sedang mengobrol. (Rachmat Kriyantono, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 100).

Wawancara mendalam pada penelitian ini dijadikan sebagai teknik pengumpulan data primer, karena dengan wawancara, peneliti dapat secara langsung bertatap muka dengan Humas untuk mengetahui dan mendapatkan data berkaitan dengan penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan data yang lengkap.

B. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 240), dan dokumentasi adalah teknik terakhir dalam pengumpulan data sekunder yang bersifat cetak.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung oleh data atau dokumentasi yang memiliki kredibilitas tinggi. (Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 240)

Dokumentasi termasuk teknik pengumpulan data sekunder, sama seperti observasi. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan penelitian, seperti contoh media sosialisasi dan foto-foto pada saat kegiatan sosialisasi.

3.4 Analisis Data

Analisis yaitu dengan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang disusun. Analisis juga dilakukan untuk menemukan makna dari data yang ditemukan untuk memberikan penafsiran yang diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan. Untuk itu, karena berupa penelitian kualitatif, menurut Moeleong (2002 : 189), menyatakan bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisa datanya yaitu melalui proses (unityzing, kategorisasi dan penafsiran data) dalam hal ini, data-data yang diperoleh yaitu dari berbagai literatur.

Namun secara lebih rinci tentang uraian ringkas mengenai langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.
- b. Kategorisasi data, dalam tahap ini data-data disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang disusun sebelumnya.
- c. Penafsiran data, pada tahap ini data yang ada kemudian diinterpretasi melalui analisis logis dengan cara deduktif-induktif berdasarkan pada teori etika.
- d. Penarikan kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam penentuan penilaian terhadap data-data yang telah ditemukan, dibahas, dan dianalisis selama penelitian.

Untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data yang telah diperoleh dan terkumpul secara komprehensif selanjutnya dianalisis sesuai dengan kelompok data baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu melakukan penafsiran data dengan menggunakan tataran ilmiah atau logika.

Untuk menganalisis data yang terkumpul sehingga diperoleh kesimpulan yang valid, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-data penelitian menurut perumusan masalah.
- b. Mencari hubungan antara praktek strategi operasional humas dengan teori-teori tentang humas.
- c. Mencari hubungan antara fact finding, planning programming, communicating dan evaluating dari kegiatan sosialisasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Serang dalam pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.
- d. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan, dimana ini merupakan titik *point* apakah sosialisasi yang telah direncanakan serta diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Serang tersebut telah sesuai dengan standar yang ada serta dapat berjalan dengan lancar sehingga berpengaruh terhadap angka golput atau masih menemukan hambatan, sehingga harus diganti oleh strategi sosialisasi yang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis sebelum memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data pada saat di lapangan, dilakukan ketika wawancara, sehingga peneliti menganalisis jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut. (Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 245).

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu (Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 246-252) :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam Penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penelitian ini bersifat deskriptif, oleh karena itu peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata dan gambaran, bukan angka-angka.

Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data dilakukan dengan *trustworthiness* yang mencakup *authenticity* dan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. (Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal 273).

Kriyantono menyatakan bahwa, penilaian keabsahan penelitian kualitatif biasanya terjadi ketika proses pengumpulan data dan analisis-interpretasi data. Jenis-jenisnya adalah (Rachmat Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 70) :

1. Kompetensi Subjek Penelitian

Artinya, subjek riset harus kredibel, caranya dengan menguji jawaban-jawaban pertanyaan berkait dengan pengalaman subjek. Bagi yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan mengenai masalah riset, data dari subjek tersebut tidak kredibel.

2. *Trustworthiness*

Trustworthiness yaitu menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkap realitas menurut apa yang dialami, dirasakan atau yang dibayangkan. *Trustworthiness* mencakup dua hal :

- a. *Authenticity*, yaitu memperluas konstruksi personal yang dia ungkapkan. Peneliti memberi kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih detail, sehingga mempengaruhi mudahnya pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya, peneliti memberi peluang subjek untuk bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya dalam konteks wawancara yang informal dan santai.

b. Analisis Triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini jawaban subjek di *cross-check* dengan dokumen yang ada.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik menurut Sugiyono :

“Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.” (Rachmat Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 274).

Peneliti menggunakan triangulasi teknik karena peneliti merasa teknik ini tepat untuk menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil wawancara yang diperoleh mengenai peran sosialisasi KPU pada Pemilu pada Kabupaten Serang tahun 2010 menghadapi golput kemudian di cek kembali dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Sehingga, apabila hasil dari ketiga teknik tersebut berbeda karena sudut pandang setiap sumber berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data untuk mencari tahu mana yang dianggap benar atau semuanya benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Tepat setahun setelah pelaksanaan pemilu 1999, pemerintah mengundang UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilu.

UU yang berlaku sejak 7 Juni 2000 tersebut mengamandemen sejumlah pasal tentang Komisi Pemilihan Umum(KPU) yang sebelumnya diatur dalam UU No.3 Tahun 1999. Dengan Undang Undang baru dikembangkan konsep KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang independen dan nonpartisipan, Yakni suatu lembaga yang bebas, mandiri dan tidak berada dibawah pengaruh, seras tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik dan ataupun Pemerintah.

Independen dan nonpartisipan merupakan respon atas keinginan masyarakat, agar pemilu dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Pemilihan Pemimpin Bangsa tidak langsung mencerminkan demokrasi yang belum menyeluruh, masih ada sekat antara pemimpin dengan rakyat, dan wakil rakyat banyak yang tidak menyuarakan suara rakyat. Oleh sebab itu pemilihan umum secara langsung dirasa cara yang paling baik dan mencerminkan demokrasi yang langsung menyentuh rakyat.

KPU Kabupaten Serang terbentuk tahun 2003 yang didalamnya terdapat beberapa biro, antara lain biro perencanaan, kepegawaian dan pengembangan SDM, keuangan, hukum, umum, biro hubungan dan partisipasi masyarakat (Hupmas) dan biro data dan informasi.

KPU Kabupaten Serang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Legislatif di tingkat Kabupaten Serang. Selain itu KPU Kabupaten Serang juga membantu melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif Provinsi dan Pusat, Gubernur Banten dan Presiden. Jadi KPU Kabupaten Serang adalah tangan dari KPU Pusat dan KPU Provinsi Banten.

Landasan yang digunakan KPU Kabupaten Serang dalam menjalankan tugasnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KPU mempunyai visi yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi KPU sendiri yaitu membangun Lembaga Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas menyelenggarakan Pemilihan Umum, menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel edukatif dan beradab, meningkatkan kualitas Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif, melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terakhir meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.2 Deskripsi Data

Penelitian ini menganalisis mengenai peran sosialisasi KPU Kabupaten Serang pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 menghadapi golongan putih ditinjau dari tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilukada Kabupaten serang tahun 2010. Teknik yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan yaitu dengan melakukan wawancara kepada sejumlah orang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas berkaitan dengan aspek sosialisasi, pemilukada dan golongan putih.

Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) yang berlangsung informal seperti orang sedang mengobrol. Peneliti

mengumpulkan data dengan mewawancarai Anggota KPU Kabupaten Serang pokja sosialisasi, Kasubbag teknis dan hupmas (hubungan partisipasi masyarakat) sekretariat KPU Kabupaten Serang, pengamat politik, dan warga Kabupaten Serang yang memiliki hak pilih.

Wawancara yang pernah dilakukan peneliti dengan Anggota KPU Kabupaten Serang pokja sosialisasi dan Kasubbag teknis dan hupmas KPU Kabupaten Serang sebanyak 3 kali yakni, pada hari senin tanggal 03 Januari 2011, selasa 04 Januari 2011 dan rabu 05 Januari 2011. Untuk wawancara yang dilakukan dengan pengamat politik Kabupaten Serang pada tanggal 04 Januari 2011. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan masyarakat Kabupaten Serang pada tanggal 05 Januari 2011.

Wawancara yang dilakukan dengan Anggota KPU Kabupaten Serang, peneliti menanyakan tentang hal-hal yang memiliki keterkaitan baik secara spesifik maupun secara umum dengan penelitian ini. Hal tersebut meliputi aturan, thapan, teknis di lapangan dan hasil dari sosialisasi. Hal lain yang ditanyakan oleh peneliti adalah tentang golput.

Selanjutnya peneliti mewawancarai kasubbag teknis dan hupmas KPU Kabupaten Serang terkait permasalahan yang sama. Peneliti berupaya membandingkan data yang didapat dari informan sebelumnya yaitu anggota KPU Kabupaten Serang pokja sosialisasi dengan data yang diperoleh dari Kasubbag teknis dan hupmas, karena keduanya berada pada pokja yang sama yaitu

sosialisasi. Dengan demikian peneliti berharap mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Setelah mendapatkan data primer tentang sosialisasi pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi untuk dijadikan data sekunder atau pendukung. Tapi ada kelemahan dalam proses ini yang disebabkan oleh pemilukada telah berakhir. Ini tidak menjadi halangan berarti bagi peneliti, karena peneliti dapat memanfaatkan arsip pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 yang ada di KPU Kabupaten Serang sebagai bahan observasi dan dokumentasi dalam penelitian ini.

Setelah semua data berhasil didapat oleh peneliti, kemudian peneliti melakukan wawancara kembali dengan pengamat politik Banten dan perwakilan masyarakat Kabupaten Serang dengan tujuan mendapatkan data yang lebih valid dan apa adanya. Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan tujuan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Landasan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010

Landasan mengenai pedoman pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 bersumber dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Menteri dan Peraturan KPU. Semua aturan tersebut berfungsi sebagai acuan bagi KPU dalam melaksanakan kegiatan Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.

Rincian landasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 131/ 05/ Kep.KPU, Srg/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010.

4.3.2 Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010

Kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Serang pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 terdiri atas tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah Planning dan Programming, tahap kedua adalah tahap Communicating dan tahap terakhir adalah tahap Evaluating.

Ketiga tahapan ini bersumber dari aturan hukum yang melandasi kegiatan pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010. Aturan tersebut meliputi Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah, serta SK KPU Kabupaten Serang Nomor 131/ 22/ Kep.KPU.Srg/ 2010 tentang sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilukada.

Satu hal yang harus digaris bawahi adalah sosialisasi merupakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan KPU dalam melakukan penyebaran informasi yang bersifat massal.

4.3.2.1 Tahap Pembuatan Rencana dan Program Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010

Tahapan sosialisasi KPU Kabupaten Serang yang pertama adalah perencanaan dan pembuatan program. Dalam membuat rencana dan program sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 merujuk pada Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan

Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah, serta SK KPU Kabupaten Serang Nomor 131/ 22/ Kep.KPU.Srg/ 2010 tentang sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilukada.

Jadi dalam hal ini tidak ada rujukan seperti hasil survey mengenai keinginan masyarakat Kabupaten Serang terhadap penyelenggaraan Pemilukada agar masyarakat dapat berperan aktif dan semacamnya yang dijadikan KPU sebagai rekomendasi perbaikan sistem Pemilu selanjutnya sehingga sosialisasi berlangsung sesuai target dan mampu meminimalisir golput.

Tahapan sosialisasi KPU Kabupaten Serang dalam menyusun rencana dan program sosialisasi, disahkan diawal melalui rapat Pleno KPU. Perencanaan yang dibuat oleh KPU dalam Pemilukada Kabupaten Serang terbagi kedalam 3 tahap.

Tahap yang pertama adalah sosialisasi kepada partai politik, LSM, dan panitia ad hoc (PPK, PPS dan KPPS). Pada tahap ini pelaksanaan sosialisasi hanya sebatas pemberitahuan mengenai Pemilukada secara general. Hal lain seperti alat peraga dan teknis belum disampaikan, karena alat tersebut belum tersedia. "Pada tahap pertama, alat peraga seperti spanduk, Baligo, dll belum tersedia, jadi sosialisasi pada tahap ini masih dalam taraf memperkenalkan kepada stackholder", ujar Dra. Enan nadia anggota KPU Kabupaten Serang pokja Sosialisasi.

Tahap Kedua adalah sosialisasi dengan menggunakan alat peraga dan sosialisasi menyeluruh dengan melibatkan media massa dalam membantu menyebarkan informasi mengenai Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010. Sosialisasi pada tahap ini dianggap yang terluas cakupannya. Dan diharapkan

memberikan dampak yang signifikan. Enan Nadia mengungkapkan, "Pada tahap kedua, sosialisasi menggaet media dan menggunakan seluh kemampuan yang ada, agar hasilnya maksimal".

Tahap terakhir adalah tahap pematapan yang melibatkan unsure internal dan eksternal secara menyeluruh. "Pada tahap sosialisasi terakhir, KPU mengontrol seluruh kegiatan sosialisasi yang sudah dijalankan dan memperbaiki semaksimal mungkin di sisa waktu yang ada" ujar Enan Nadia kepada peneliti. Dalam tahap ini tim fasilitator dari Pemda membantu dengan cara menggunakan mobil woro-woro berkeliling ke daerah yang masuk wilayah Kabupaten Serang, dengan tujuan mengingatkan masyarakat dan berharap masyarakat terpenggil untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.

4.3.3.2 Tahap Pelaksanaan Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010

KPU Kabupaten Serang dalam menjalankan sosialisasi merujuk pada landasan dasar yaitu Peraturan KPU Nomor 65 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta surat keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 131/ 22/ Kep.KPU.Srg/ 2010 tentang pedoman pelaksanaan dan penyampaian informasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Serang tahun 2010.

Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang tahun 2010 dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan akhir bulan april 2010 oleh KPU Kabupaten Serang, PPK dan PPS se-Kabupaten Serang kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Serang.

Langkah awal KPU dalam proses sosialisasi yaitu dengan membuat kelompok kerja (pokja) sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang lalu setelah terbentuk langsung membuat planning atau rencana program yang akan dijalankan untuk sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.

Pelaksanaan Program sosialisasi KPU Kabupaten Serang diawali dengan Launching Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010 yang bertempat di Alun-alun Barat Kota Serang pada tanggal 14 Januari 2010. Dalam kesempatan ini tamu yang di undang yaitu unsur Muspida Kabupaten Serang, Muspika Kabupaten Serang, Anggota KPU pusat, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat Kabupaten Serang.

Program Kedua adalah sosialisasi kepada 37 partai politik di Kabupaten Serang bertempat di hotel Mahadria Kota Serang pada tanggal 28 Januari 2010.

Selanjutnya adalah sosialisasi kepada pemilih pemula yang melibatkan seluruh pelajar SLTA atau sederajat di Kabupaten Serang dengan menghadirkan Pembina dan pengurus Osis yang dilaksanakan di gedung Korpri pada tanggal 11 maret 2010.

Pelaksanaan program selanjutnya yaitu kepada masyarakat Desa Warga-sara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang pada tanggal 3 April 2010.

Sosialisasi selanjutnya kepada Ketua dan Sekretaris PPK se-Kabupaten Serang bertempat di gedung Korpri Kabupaten Serang pada tanggal 10 April 2010, dan setelah ketua dan sekretaris mendapatkan pembekalan materi sosialisasi dari KPU, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilanjutkan oleh Ketua dan Sekretaris PPK kepada masyarakat Kecamatan dan Kelurahan / Desa masing-masing.

Selanjutnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Serang dalam bentuk Pemasangan Iklan Pemilukada Kabupaten Serang di media elektronik, seperti radio dan televisi lokal (Banten tv) di Kabupaten Serang, Pemasangan Iklan Pemilukada Kabupaten Serang di media cetak (Radar Banten dan Fajar Banten) dan melalui pemasangan baligo, spanduk, poster, leaflet dan stiker.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilihat dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 982.391 orang, maka dapat diprosentasikan bahwa partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010 adalah sebanyak 581.676 orang atau 59,21%. Dengan kata lain jumlah golput sangat tinggi yaitu 400715 atau 40,79%.

4.3.3.3 Tahap Evaluasi Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010

Setelah pemilukada selesai diselenggarakan, KPU Kabupaten Serang melaksanakan rapat evaluasi Pemilukada di Lembang, Bandung pada tanggal 07, 08, 09 Juli 2010.

Dalam rapat tersebut KPU me-riview semua tahapan yang telah diselenggarakan, baik dari segi perencanaan, pembuatan program, pelaksanaan dan hal lain yang masih berhubungan dengan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Serang tahun 2010.

Pembahasan mengenai sosialisasi tidak terlampau spesifik, seperti yang dituturkan Enan pada peneliti, “Disana (Lembang) kami membahas tentang keseluruhan pelaksanaan PemiluKada, jadi tidak terlalu menyoroti tentang sosialisasi”. Selanjutnya Enan menambahkan, sosialisasi yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peneliti melihat sebetulnya bila benar-benar diselenggarakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebetulnya hasil rapat evaluasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PemiluKada selanjutnya.

Dari hasil ini, peneliti merasa belum mendapatkan hal yang diinginkan, oleh karena itu peneliti kemudian melakukan wawancara mendalam selain dengan informan kunci juga dengan pengamat politik dan perwakilan warga Kabupaten Serang.

Dari hasil wawancara mendalam peneliti dengan informan primer dalam hal ini anggota KPU Kabupaten Serang pokja sosialisasi Ibu Dra. Enan Nadia, beliau mengatakan bahwa KPU pokja sosialisasi telah menjalankan sosialisasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

“Kami telah berupaya maksimal dalam melaksanakan sosialisasi sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan membuat perencanaan dan penyusunan program sosialisasi misalnya dengan membuat alat publikasi, melakukan monitoring dan bekerjasama dengan media massa dalam menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang tentang Pemilu Kabupaten Serang tahun 2010.”

Hal senada di ungkapkan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Serang Drs. Alep Taryana, R, MM yang juga anggota pokja sosialisasi, “Semua upaya telah kami lakukan untuk mendongkrak partisipasi pemilih, tapi kami hanya bisa berupaya dengan apa yang kami bisa lakukan, tetapi kami yakin apa yang telah saya dan rekan-rekan dalam pokja sosialisasi sudah maksimal, bahkan kami bergerak ekstra dalam menyebarluaskan informasi.”

Alep menambahkan, dalam menjalankan program kerja pasti ada kekurangan dan kelebihan, setiap orang mudah menerima kelebihan tapi sulit menerima kekurangan.

Pengamat politik Banten M.Ali Surohman mengemukakan pendapatnya,

“Menurut saya, KPU sudah cukup baik dalam penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Serang, tetapi masyarakat sekarang lebih mementingkan kebutuhan pribadinya. Mereka lebih memilih bekerja daripada mengikuti pemilu, dan masih banyak alasan lain yang menyebabkan mereka tidak menggunakan hak pilihnya.”

Tapi dirinya menambahkan bahwa sosialisasi Pemilu Kabupaten Serang lebih terasa di daerah perkotaannya. Sedangkan di pelosok kurang begitu terdengar. Menurutnya, mungkin dengan dana yang ada KPU berupaya

memanfaatkan media massa. Namun bila mengandalkan media saja, masyarakat pelosok Kabupaten Serang mungkin banyak yang tidak mengetahuinya, karena masih banyak yang belum mempunyai televisi atau radio. Sekalipun ada, gelombangnya belum dapat diterima, karena tv local pemancarnya terbatas.

M. Ali Surohman memberikan keterangan hal lain yang mempengaruhi banyaknya golput di Pemilukada Kabupaten Serang. Pemilihan lurah yang sarat akan money politik menjadi salah satu faktor merosotnya jumlah suara dalam pemilukada,

“Bayangkan saja, pada saat pemilihan lurah setiap kepala dalam satu rumah memperoleh uang dengan tujuan memilih salah satu calon lurah, tapi pada saat pemilukada paling satu rumah hanya bapaknya saja yang kebagian amplop, sisanya tidak, jadi masyarakat males milih. Ini merupakan kenyataan dilapangan.”

Fenomena ini diperkuat dengan pernyataan Sangaji warga Kabupaten Serang desa Ciruas, Ia mengaku tidak memilih karena tidak mendapatkan uang dan jenuh dengan pemilu dan kondisidi di TPS, “Nggga ada uangnya bos, pilih kasih ngasihnya, ngapain milih. Disananya (TPS) juga gitu-gitu aja, meningan nyawah dapet duit buat makan sehari-hari. Laju siapa aja yang kepilih juga sama aja bos, meningan ga milih.”

Ketika ditanya mengenai sosialisasi, Sangaji hanya melihat spanduk saja, tapi tidak pernah ikut serta dalam sosialisasi yang dibuat oleh KPU, PPK atau PPS. Jadi wajar saja ketika masyarakat terutama dipelosok Kabupaten Serang tidak mengetahui tentang pelaksanaan Pemilukada,

Ini merupakan fakta yang tidak dapat kita pungkiri bersama, harus ada satu solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menyadarkan masyarakat bahwa pemilu itu merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpinnya, yang disadari atau tidak pemimpin terpilih akan menentukan nasib mereka selanjutnya.

4.3.4 Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan persiapan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 dilaksanakan berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tahun 2010 dari Dinas Kependudukan Kabupaten Serang dalam bentuk data elektronik (Softcopy), dan selanjutnya DP4 tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih (DP).

Untuk kegiatan penyusunan Daftar Pemilih KPU Kabupaten Serang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Serang nomor 274/ 11/ Kep.KPU. Srg/ 2009 tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA). Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 yang anggotanya terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Serang, Sekertariat KPU Kabupaten Serang dan DISDUK CAPIL Kabupaten Serang.

Dalam melaksanakan tahapan kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihan KPU Kabupaten Serang melakukan persiapan antara lain:

1. Melaksanakan Sosialisasi kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) kepada PPK, PPS, dan PPDP
2. Mempersiapkan data dalam bentuk cetak (Hard Copy) dan data elektronik (Soft Copy) / CD serta bahan kebutuhan untuk penyusunan data pemilih/daftar pemilih yang akan disampaikan ke PPDP, PPS melalui PPK Se-Kabupaten Serang.

Selanjutnya dari pelaksanaan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (Model A4-KWK) dan Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4-KWK) di tetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 274/33.Kep.Srg/2010 tentang Penetapan Jumlah pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan wakil Daerah Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Jumlah Pemilih Laki-laki sebanyak | 497.276 Pemilih; |
| 2. Jumlah Pemilih Perempuan sebanyak | <u>485.115 Pemilih;</u> |
| 3. Jumlah Pemilih seluruhnya sebanyak | 982.391 Pemilih; |
| 4. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.302 TPS Se-Kabupaten Serang. | |

4.4 Pembahasan

Subbab pembahasan ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai peran sosialisasi KPU pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 Menghadapi golput. Hasil penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPU Kabupaten Serang baru saja menyelesaikan tugas melaksanakan pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010. Dalam penyelenggaraan pemilukada, KPU Kabupaten Serang bisa dikategorikan aman, karena penyelenggaraan pesta demokrasi ini berjalan aman dan kondusif. Bahkan tidak ada tuntutan yang berarti dilayangkan kepada Mahkamah Agung terkait pelaksanaan pemilukada.

Tapi ada hal yang harus dibenahi bersama dalam hal partisipasi pemilih. Jumlah golput dalam pemilukada Kabupaten Serang mencapai 400.715 orang atau 40,79% dari jumlah DPT sebanyak 982.391 orang. Angka yang fantastis, hampir setengah dari jumlah DPT masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak memilih. Pasti banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi. Tetapi satu-satunya cara KPU dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat adalah dengan cara sosialisasi. Ada apa dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang, apakah tidak maksimal atau tidak tepat sasaran?

Setelah terjun langsung melakukan penelitian, peneliti melihat bahwa pelaksanaan sosialisasi KPU terkesan apa adanya. Apa adanya disini misalnya perihal anggaran yang diajukan KPU walaupun yang cair tidak sesuai dengan pengajuan Pemilukada tetap dijalankan dengan dana yang seadanya.

Temuan peneliti tentang golput dilapangan, banyaknya masyarakat yang tidak memilih baik dengan alasan sudah apatis terhadap Pemilu, tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap), memilih untuk bekerja dan sikap sejenis, mereka masuk kedalam suara golput atau golongan putih.

Golput juga merambah ke lingkungan masyarakat kelas miskin. Mereka berpikir pragmatis dalam menyikapi Pemilukada. Mereka hanya mementingkan materi untuk dirinya sendiri. Ini adalah kebiasaan yang telah berakar yang bersumber dari money politic yang dilakukan Calon dalam kegiatan Pemilu. Hal ini harus kita perbaiki bersama dengan sangsi yang tegas tentunya, agar memberikan efek jera bagi yang melakukan dan menerimanya.

Golput yang awalnya hanya gerakan moral, saat ini telah masuk kedalam masyarakat dengan wujud yang lain berdasarkan pengalaman yang sudah masyarakat rasakan sendiri. Dan KPU selaku penyelenggara Pemilu tidak bisa berbuat banyak, karena terbentur pada satu dan lain hal.

Hal yang sebenarnya bisa berdampak signifikan untuk menghadapi golput adalah sosialisasi Pemilukada. Sosialisasi pemilihan umum kepala daerah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 65 tahun 2009 yang isinya menjelaskan tentang ketentuan umum, asas pelaksanaan sosialisasi, tujuan dan target pencapaian dalam sosialisasi, tema dan materi sosialisasi, metode dan media informasi sosialisasi, strategi sosialisasi dan ketentuan lain.

Belum lagi ditambah aturan pendukung pelaksanaan sosialisasi yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Serang berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten

Serang Nomor 131/ 22/ Kep.KPU.Srg/ 2010 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi dalam pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010. Apakah aturan tersebut belum cukup sebagai landasan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang dalam melaksanakan sosialisasi agar meraih partisipasi pemilih yang tinggi?

Jika ditinjau dari aspek kehumasan, KPU sebagai sumber yang menciptakan pesan harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan, pesan yang disampaikan harus efektif dan efisien agar mudah dimengerti oleh public. Pesan dalam sosialisasi berupa materi sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat, yang berisi semua hal yang berhubungan dengan Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010. KPU menggunakan media massa dan media nirmassa dalam penyebaran informasi, dengan harapan mampu melakukan sosialisasi yang efektif dan mampu menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Serang.

Selain itu, KPU pokja sosialisasi harus benar-benar memahami kebutuhan masyarakat dan mampu mengaplikasikannya kedalam suatu program supaya masyarakat dapat memberikan penghargaan yang sama kepada penyelenggara Pemilukada. Misalnya dengan mengadakan survey terlebih dahulu mengenai keinginan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilukada, hasilnya misalnya masyarakat ingin di TPS diadakan lomba-lomba terlebih dahulu, kemudian KPU mewujudkan itu. Bila keinginan masyarakat sudah terpenuhi, maka tidak akan ada lagi alasan untuk tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Dalam menjalankan sosialisasi, KPU membuat kelompok kerja (pokja) yang berjumlah maksimal 10 orang baik dari anggota KPU maupun dari sekretariat KPU. Pokja ini yang menyusun, menjalankan dan mengevaluasi program sosialisasi.

Pokja sosialisasi bekerja sesuai dengan aturan dan tahapan yang ada. Jadi dalam hal ini pokja sosialisasi tidak dapat membuat program diluar dari aturan yang berlaku, dapat dikatakan pokja sosialisasi hanya sebagai penyusun dan pelaksana program ang sifat kerjanya tidak bisa keluar dari aturan yang ada.

Seperti yang di sampaikan Alep Taryana Kasubbag teknis dan hupmas KPU Kabupaten Serang, "KPU hanya melaksanakan kegiatan pemilukada sesuai dengan aturan dan tahapan yang ada", dengan kata lain KPU tidak melakukan tahap fact finding sebelum melaksanakan tahapan sosialisasi.

Selain itu dalam melakukan sosialisasi, KPU terganjal perihal anggaran. Usulan anggaran yang diajukan KPU kepada Pemerintah daerah terganjal oleh jumlah anggaran yang telah dipatok oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, seperti pernyataan Dra. Enan Nadia anggota KPU Kabupaten Serang, "sebetulnya KPU sudah membuat rincian anggaran sosialisasi, tapi anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan yang diterima, karena faktor pengkotak-kotakan anggaran". Enan menambahkan, dalam pelaksanaan Pemilukada, hal dilematis seperti ini sudah biasa terjadi. Jadi berapapun anggaran yang keluar dari Pemda, mau tidak mau, cukup tidak cukup, tahapan Pemilukada harus dilaksanakan. Menurut peneliti, ini yang menyebabkan hasil pemilukada tidak maksimal, terutama dalam hal

sosialisasi. Jadi dapat dikatakan KPU tidak menggunakan tahap fact finding dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang.

Disisi lain, Pemerintah daerah membuat tim yang memfasilitasi kebutuhan alat peraga Pemilukada seperti spanduk, baligo, dll yang bekerja dibawah naungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Serang. Anggaran khusus untuk tim ini sangat besar, nilainya mencapai 2,2 milyar rupiah.

Yang sangat disayangkan, anggaran sebesar itu dimanfaatkan bukan untuk kegiatan sosialisasi Pemilukada, tetapi malah disalahgunakan untuk kebutuhan pribadi dan kelompok, seperti yang peneliti kutip dari Harian radar Banten edisi Selasa 04 Januari 2011, “.....Handoyono, ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian Negara dalam pengadaan barang cetakan dan spanduk pada Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.” (RB, 4 Januari 2010)

Handoyono adalah Kepala subbidang Sistem Implementasi Politik Kesbangpolinmas yang ditunjuk sebagai tim fasilitator Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010. Sungguh suatu hal yang ironis, disaat anggaran KPU tidak sesuai dengan pengajuan, orang-orang yang berada di Pemda malah bermain demi kepentingan pribadi.

Pada tahap ini peneliti tidak melihat upaya maksimal dari KPU dalam membuat sebuah rekomendasi yang bisa diajukan untuk dijadikan landasan yang digunakan untuk membuat dan melaksanakan program sosialisasi, padahal hal

tersebut adalah hal yang paling fundamental agar program yang dibuat terarah dan sesuai sasaran.

Hal lain yang peneliti temukan dilapangan adalah wujud materi sosialisasi yang monoton disetiap pemilukada, yang dibuat hanya spanduk lagi, pamflet lagi, baligo lagi, hanya desainnya saja yang dirubah, itupun hanya sedikit.

Ada sedikit perkembangan dalam pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010 yaitu dengan menggaet stasiun tv lokal untuk menyelenggarakan debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang, tetapi ini juga belum efektif karena masih banyak masyarakat Kabupaten Serang yang belum memiliki tv, dan juga mereka lebih senang dengan acara tv nasional, jadi jarang melihat acara tv lokal.

KPU harus mengetahui kebutuhan masyarakat agar masyarakat mau datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya sebagai perwujudan demokrasi.

Diluar kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu, seharusnya partai politik mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara berkesinambungan. Hal ini sangat berpengaruh besar kepada kesadaran politik masyarakat. Apabila ini dapat benar-benar dilaksanakan oleh partai politik dengan penuh rasa tanggung jawab, maka dapat mendongkrak partisipasi pemilih secara menyeluruh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan di bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menyusun strategi sosialisasi KPU tidak melakukan pengumpulan data yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Serang. KPU membuat program hanya berdasarkan kepada aturan hukum tentang sosialisasi.
2. Tahapan sosialisasi KPU Kabupaten Serang yang pertama adalah perencanaan dan pembuatan program. Dalam membuat rencana dan program sosialisasi Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2010 merujuk pada peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah, serta SK KPU Kabupaten Serang Nomor 131/ 22/ Kep.KPU.Srg/ 2010 tentang sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilukada. Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang tahun 2010. Tahapan sosialisasi KPU Kabupaten Serang dalam menyusun rencana dan program sosialisasi, disahkan diawal melalui rapat Pleno KPU.

3. Sosialisasi Pemilukada dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan akhir bulan april 2010 oleh KPU Kabupaten Serang, PPK dan PPS se-Kabupaten Serang kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Serang. Dengan menjalankan seluruh program yang telah dibuat. Program sosialisasi yang dibuat oleh KPU dalam Pemilukada Kabupaten Serang terbagi kedalam 3 tahap, yaitu:

Tahap yang pertama adalah sosialisasi kepada partai politik, LSM, dan panitia ad hoc (PPK, PPS dan KPPS).

Tahap Kedua adalah sosialisasi dengan menggunakan alat peraga dan sosialisasi menyeluruh dengan melibatkan media massa dalam membantu menyebarkan informasi mengenai Pemilukada Kabupaten Serang tahun 2010.

Tahap terakhir adalah tahap pematapan yang melibatkan unsur internal dan eksternal secara menyeluruh. KPU Kabupaten Serang melaksanakan rapat evaluasi Pemilukada di Lembang, Bandung pada tanggal 07, 08, 09 Juli 2010. Dalam acara tersebut tahapan sosialisasi di evaluasi, tapi tidak spesifik dan tidak menghasilkan rekomendasi yang berarti.

4. KPU Kabupaten Serang melaksanakan rapat evaluasi Pemilukada di Lembang, Bandung pada tanggal 07, 08, 09 Juli 2010. Dalam rapat tersebut KPU me-riview semua tahapan yang telah diselenggarakan, baik dari segi perencanaan, pembuatan program, pelaksanaan dan hal lain yang masih berhubungan dengan pelaksanaan Pemilukada

Kabupaten Serang tahun 2010. Pembahasan mengenai sosialisasi tidak terlampau spesifik karena KPU membahas secara keseluruhan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Serang tahun 2010.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk kajian ilmu komunikasi, sosial dan politik adalah:

1. Pendidikan politik kepada masyarakat harus continue dilakukan terutama oleh partai politik dan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Agar masyarakat menjadi paham tentang demokrasi dan dapat mengamalkannya. Pendidikan politik kepada masyarakat hendaknya dikenalkan lebih awal kepada pemilih pemula dalam rangka pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang baik dalam berpolitik.
2. Kegiatan berupa Seminar atau sejenisnya untuk masyarakat, Pemerintah dan Lembaga tentang fenomena sosial dan politik harus sering dilakukan, supaya seluruh stakeholder mampu memposisikan diri dalam kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat.
3. Penyadaran bahwa sosialisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU tetapi merupakan tanggung jawab

seluruh stakeholder harus disepakati dan dilakukan bersama.

Saran dan rekomendasi untuk KPU Kabupaten Serang dalam melaksanakan sosialisasi adalah:

1. Tahapan sosialisasi harus dimulai dari tahap fact finding (pengumpulan fakta dan data) untuk dijadikan sebagai rujukan perencanaan dan pembuatan program sosialisasi. Fakta dan data tersebut bisa juga dari hasil survey mengenai keinginan masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada, agar mereka menggunakan mau datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.
2. DPS harus dipublikasikan setiap enam bulan sekali melalui media massa dan online. Supaya data pemilih menjadi akurat dan terkontrol.
3. Laporan anggaran Pemilukada misalnya sumber dana, pengadaan barang, pengadaan operasional harus di publikasikan luas menggunakan media massa dan online agar tercipta sebuah transparansi dan kepercayaan terhadap KPU.
4. KPU harus memperbaiki system Pemilihan Umum baik dari segi substantif, teknis dan nonteknis.
5. Undang-Undang tentang Pemilu, Pemerintah Daerah, Parpol dan Peraturan KPU harus direvisi, karena jika terus di

gunakan tanpa adanya perubahan, maka angka partisipasi pemilih akan semakin menurun.

6. Membuat solusi lain yang lebih efektif dan efisien untuk menggantikan pemilihan ulang. Karena pemilihan ulang menguras anggaran yang besar tapi hasilnya tidak maksimal. Perlu adanya ketegasan KPU dan MK dalam menggunakan otoritasnya untuk mengambil sikap menanggapi gugatan pemilu yang masuk ke MK.
7. Pengumuman Pemilukada melalui media massa dilakukan per-TPS agar seluruh masyarakat dapat benar-benar mengontrol hasil Pemilukada, tidak ada yang disembunyikan.
8. Harus ada standarisasi terkait sumbangan kepada parpol, guna membuka peluang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

Akhirnya, peneliti berharap semua stakeholder yang ada di Kabupaten Serang menyadari bahwa kegiatan Pemilukada harus dilaksanakan semaksimal mungkin, karena kegiatan ini menentukan nasib masyarakat Kabupaten Serang dalam lima tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. Linggar. 2005. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ardianto, Elvinaro. 2009. *Public Relations Praktis*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Burhan Bungin, S. sos,Msi, Prof, Dr, 2006, Pengantar Public Relations Strategi Menjadi Humas Profesional, Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Cutlip, Scott M., Et al. 2005. *Effective Public Relations, Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dengan Sukses edisi Kedelapan*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Effendi, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Frazier Moore, Ph.d. H, 2005, Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi, Bandung: Rosda.
- Idi, Abdullah dan Suharto, Toto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kusumastuti Frida, 2001, *Dasar-Dasar Humas*, Malang: Ghalia Indonesia.

Mulyana Deddy, 2002, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Rosdakarya.

Muslimin. 2004. *Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian*. Malang: UMM Press.

Nasution, Zulkarnain. 2006. *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. Malang: UMM Press

Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Public Relations*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Pabottinggi Mochtar, "Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik" dalam *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta, Gramedia, 1993; Jack Plano dkk., *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Jakarta 1989.

Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ruslan, Rosadi. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ruslan Rosady, S.H., M.M, 2006, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sitorus. M, Drs, 2003, Berkenalan dengan Sosiologi, Jakarta: Erlangga.

Soemirat, Soleh dan Ardianto, Elvinaro. 2007. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun Kamus. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wiryanto., Dr, Ma, 2004, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Grasindio.

Widjaja, H.A.W. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Yulianta Neni, Dra, Ms, Hj, 1999, Dasar-Dasar Public Relations, Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.

Sumber Lain :

www.Google.com

Undang-Undang Pemilu

Peraturan KPU

SK KPU Kabupaten Serang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Ahditya Angga Pratama
NIM : 061589
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 29 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bhayangkara Komplek Abri Blok E No. 4
Kec. Cipocok Jaya Serang - Banten 42121
Telp / HP : 0856 197 6254
Email : Blackgitar29@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN 3 Serang (1994 – 2000)
SLTPN 4 Serang (2000 – 2003)
SMA Prisma Serang (2003 – 2006)
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2006 – 2011)
Pengalaman Organisasi : 1. Wakil Ketua Osis SLTPN 4 Serang
2. Wakil Ketua Osis SMA Prisma Serang
3. Pengurus HMJ Ilmu Komunikasi
4. Ketua Umum UKM Klasik Untirta